

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ekonomi dunia semakin terintegrasi ke dalam satu unit yang homogen karena kemajuan teknologi yang pesat dan ekspansi kapitalisme yang semakin meluas yang mendorong terwujudnya globalisasi dunia dan terciptanya liberalisasi perdagangan. Dewasa ini liberalisasi perdagangan semakin gencar dijadikan isu internasional, meskipun isu liberalisasi perdagangan bukan merupakan hal yang baru (ide ini sudah ada sejak abad 18 yang salah satu pencetusnya adalah Adam Smith). Dalam liberalisasi perdagangan negara, setiap pelaku bisnis dan perusahaan bebas melakukan persaingan global melintas batas negara.

Dengan adanya liberalisasi perdagangan maka permasalahan dalam perdagangan pasti terjadi. Misalnya adanya permainan tariff bea masuk suatu produk yang dikenakan suatu negara terlalu tinggi guna untuk melindungi perusahaan domestik dalam negara tersebut. Maka untuk mengantisipasi ataupun menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam liberalisasi perdagangan pada tahun 1947 dibentuklah GATT (General Agreement Trade on tariff) suatu kompromi sementara untuk: (1) pengurangan tariff, (2) pelarangan hambatan kuantitatif dan non-tariff lainnya, dan (3) penghapusan diskriminasi perdagangan. Kompromi ini pada mulanya ditandatangani oleh 22 negara.

Dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri merupakan lembaga non pemerintah yang merupakan wadah untuk...

pembinaan, komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dengan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian dan jasa dalam arti yang luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, serta wadah penyaluran aspirasi bagi pengusaha di Indonesia dalam bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta.

Alasan pemilihan judul bagi penulis adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan WTO tentang Agreement on Trade-Related Investment Measures Oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada periode 2003-2005. Selain itu penulis mempunyai beberapa alasan antara lain:

1. Topik penulisan tersebut belum pernah ditulis oleh mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Tertarik pada keberadaan WTO sebagai organisasi internasional yang terkait dengan lingkup perdagangan internasional.
3. Tertarik pada Kadin Indonesia sebagai wadah dunia usaha di Indonesia yang terkait dengan perdagangan internasional.
4. Memudahkan pembaca mendapatkan gambaran singkat mengenai isi dari rencana penulisan karena judul singkat dan langsung pada topik

kegiatan komunikasi dan konsultasi antar perusahaan industri dengan pemerintah mengenai masalah yang berkaitan dengan masalah perdagangan internasional dan jasa dalam arti yang luas mencakup seluruh kegiatan ekonomi serta kegiatan perdagangan seperti bagi perusahaan di Indonesia dalam bidang usaha negara usaha ekspor dan usaha swasta.

Atas perhatian label pada gambar untuk memperjelas implementasi Kebijakan WTO tentang Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights yang dimuat dalam perjanjian WTO tahun 2003-2005. Selain itu penulis juga ingin membahas aspek lain.

1. Topik penelitian tersebut belum pernah ditulis oleh mahasiswa lain di Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Teknik pada penelitian WTO sebagai organisasi internasional yang terkait dengan tingkat perdagangan internasional.
3. Teknik pada Aspek Industri sebagai aspek yang ada di Indonesia yang terkait dengan perdagangan internasional.
4. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sangat penting bagi perkembangan penelitian karena judul yang akan dibahas pada topik permasalahan.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Suatu penulisan ilmiah, dilakukan untuk memberikan gambaran obyektif tentang fenomena tertentu yang terjadi, penulisan antara lain bertujuan untuk:

1. Menjelaskan secara obyektif mengenai WTO dan kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam WTO yang mengatur tentang perdagangan internasional.
2. Memberikan penjelasan secara obyektif mengenai Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan ratifikasi kesepakatan WTO oleh KADIN.
3. Sarana penulisan teori atau kerangka dasar pemikiran yang telah mahasiswa peroleh selama studi sehingga nantinya dapat menunjang seorang sarjana S1, mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Tujuan dari penelitian ini adalah :

Mengerti dan memahami adanya tugas dan peranan WTO dalam mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional serta dampak dari kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan di WTO terhadap perkembangan dunia usaha (KADIN khususnya).

C. Latar Belakang Masalah

Dunia kini menghadapi era yang ditandai dengan kecenderungan liberalisasi perdagangan dunia sebagai akibat dari banyaknya negara yang ingin

melakukan kebebasan ekonomi yang ditunjang dengan majunya teknologi komunikasi dan industri.

Liberalisasi sendiri mengandung pengertian bahwa setiap negara, bahkan setiap pelaku bisnis dan perusahaan bebas melakukan persaingan global. Namun untuk mewujudkan pasar persaingan yang bebas dan sehat tidaklah mudah. Pada kenyataannya, perdagangan internasional banyak diwarnai persaingan tidak jujur dan banyak dihambat proteksi-proteksi, seperti permainan tarif, pembatasan kuota baik impor maupun ekspor serta hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Namun dalam liberalisasi perdagangan (persaingan bebas) hambatan-hambatan itu harus ditiadakan.

Untuk mencegah semakin meningkatnya kecenderungan proteksionisme diberbagai negara maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur tentang perdagangan internasional. Pada awalnya lembaga ini adalah GATT lembaga pengaturan tentang tariff dan kemudian baru pada tahun 1994 dibentuklah WTO.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tanggal 2 Nopember 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) Agreement Establishing the World Trade Organization, maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional.

Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya hak dan kewajiban. Di samping itu pula, WTO bukan hanya menciptakan peluang (*opportunity*),

semua hasil perundingan di banding akses pasar akan menjadi peluang besar. Seperti diketahui, negara-negara maju telah menurunkan tarif untuk industri dari rata-rata 6,3% menjadi 3,8% (penurunan sebesar 40%) dari tarif "no1" telah meningkat dari 20% menjadi 40% dari seluruh produk industri yang masuk ke negara maju. Hal inilah yang menjadi peluang besar terhadap ekspor negara berkembang termasuk Indonesia.¹

Terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat catatan di bidang akses pasar ini, antara lain adalah hasil negosiasi akses pasar ini adalah Multilateral MFN, dimana semua negara anggota dapat menikmatinya tanpa terkecuali.

Dimana sistem ekonomi negara yang menjadi anggota WTO sudah terbuka dalam liberalisasi perdagangan secara global. Sejalan dengan perubahan tersebut, kerjasama multilateral dan regional semakin banyak dikembangkan guna mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi. Karena setiap negara yang terlibat dalam liberalisasi perdagangan dunia memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing, dan tidak jarang terjadi benturan dan konflik kepentingan antar negara khususnya dalam hal perdagangan sebagai bagian dari ekonomi politik internasional.²

¹ Djumadi Anwar, Diktat 1 Perdagangan Internasional (WTO dan Sitem Perdagangan Dunia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Konsekuensinya adalah persaingan semakin tajam. Karena posisinya sama, maka dalam pemanfaatannya akan berlaku hukum alam, siapa yang lebih kuat atau lebih siap, dia yang akan menang. Dalam sistem ekonomi terbuka, program ekspor merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebuah negara dan penciptaan lapangan kerja dan dituntut untuk lebih siap untuk dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari peluang yang dihasilkan oleh WTO. Peluang dan manfaat dari keanggotaan Indonesia di WTO hanya dapat diperoleh apabila Indonesia, dalam hal ini KADIN Indonesia mampu menguasai semua persetujuan yang ada di WTO dan menerapkannya sesuai dengan kepentingan nasional.

Diantara kepentingan nasional Indonesia adalah untuk dapat selalu mengembangkan ekonomi nasional yang mampu bersaing dalam era liberalisasi perdagangan dan terlaksananya pembangunan nasional yang merata. Dan untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut, maka dibutuhkan investasi yang besar. Disini investasi adalah sangat penting adanya untuk mengembangkan ekonomi nasional dan terlaksananya pembangunan yang merata. Dan untuk menunjang investasi tersebut harus ada undang-undang yang jelas dan faktor penunjang dari kegiatan investasi tersebut (*infrastruktur*).

Perkembangan investasi itu bisa dicermati dari laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengungkapkan penanaman modal asing (PMA) mencapai US\$3,3 triliun pada Januari-Juli 2004 atau turun 33,6% dari periode yang sama tahun lalu yang masih US\$4,07 miliar. Pada periode itu

penanaman modal dalam negeri (PMDN) justru naik 34% menjadi Rp18,7 triliun dari Rp13,97 triliun yang berhasil diraih pada tujuh bulan pertama tahun lalu.³

Laporan BKPM tersebut belum mencerminkan perkembangan investasi yang sesungguhnya mengalir ke Indonesia. Laporan BKPM selama ini hanya berkuat pada pencatatan persetujuan investasi di luar penanaman modal a.l. sektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non-Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, dan investasi yang perizinannya dikeluarkan instansi teknis/sector, Investasi Portofolio (Pasar Modal) dan investasi rumah tangga. Dengan demikian data penanaman modal dalam laporan ini tidak menggambarkan seluruh kegiatan investasi yang ada di Indonesia.

Gambar 1.1
Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal
1967 / 1968 – 30 April 2004

Tahun	PMDN		PMA	
	PROYEK	NILAI (Rp. Trilyun)	PROYEK	NILAI (US\$. Juta)
1994	825	53,6	444	27,0
1995	793	69,8	782	39,9
1996	807	97,5	947	29,9
1997	723	119,9	781	33,8
1998	327	58,0	1,033	13,6
1999	237	53,5	1,176	10,9
2000	392	94,0	1,542	16,1
2001	264	58,8	1,334	15,1
2002	188	25,2	1,151	9,8
2003	196	50,1	1,049	13,6
2004*	46	18,7	306	2,3

perkembangan sampai Januari-April 2004*

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

³ Biro Perencanaan dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Perkembangan Persetujuan dan Izin Tetap Penanaman Modal*, April 2004, hal.6

Sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha Kadin memiliki akses informasi bisnis dan peluang usaha yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh setiap pihak yang membutuhkan, seperti para calon investor, praktisi bisnis, para wirausaha, perbankan dan dunia pendidikan, para mahasiswa dan kalangan akademisi.

D. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Kebijakan WTO tentang Agreement on Trade Related Investment Measures di Indonesia, khususnya di Kadin Indonesia?”

E. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai kelompok kejadian. Semakin banyak kejadian yang dapat dijelaskan oleh semakin sedikit pernyataan, berarti toerinya semakin baik.⁴

1. Kebijakan World Trade Organization

a Pengertian Kebijakan

Pengertian kebijakan menurut Heine Eku dan Kenneth Druvit dalam

Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repositivement*) tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.⁵

Menurut Miftah Thoha, dalam arti luas *policy* mempunyai 2 (dua) aspek pokok antara lain:⁶

- 1) *Policy* merupakan praktik sosial, ia bukan even yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- 2) *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh, baik untuk mendamaikan "*claim*" dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan "insentif" bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

2. World Trade Organization

WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Organisasi WTO yang terbentuk pada tanggal 1 Januari 1995, merupakan kelanjutan dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tahun 1947. Tujuan utama dari WTO adalah untuk menciptakan persaingan sehat dibidang perdagangan internasional bagi

⁵ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 47.

anggotanya. Sedangkan secara filosofis tujuan WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.

Dalam pembahasan mengenai permasalahan diatas, penulis menggunakan *Teori Persepsi dan Konsep Globalisasi*.

Teori Persepsi

Menurut pendapat Holsti bahwa tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh cara ia memandang, menafsirkan dan menilai lingkungannya baik fisik ataupun lingkungan sosial.⁷ Persepsi itu mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi yang dihadapinya. Apakah situasi itu baik atau buruk, merupakan ancaman atau tidak dan lain-lain.

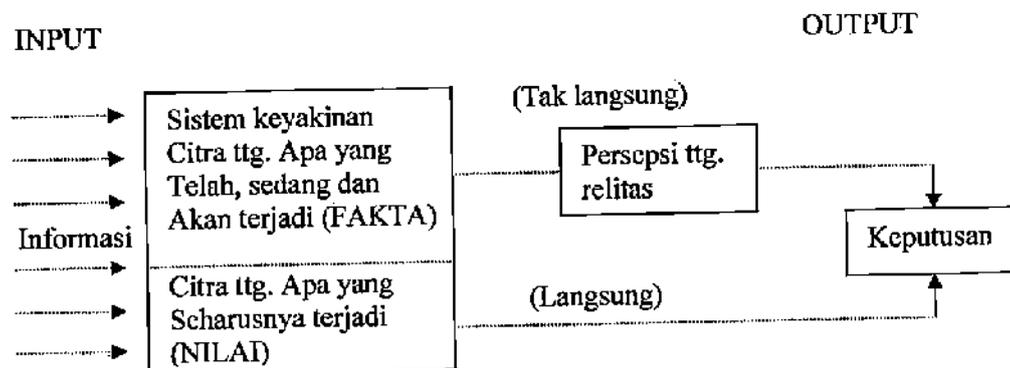
Disamping itu, satu hal yang berkaitan dengan persepsi adalah citra (image) yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok orang dalam menentukan suatu kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan. Menurut pendapat Kenneth Boulding, ketika kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia, sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia nyata itu mungkin berbeda. Kita harus mengakui bahwa orang-orang yang menentukan kebijaksanaan dan tindakan negara-negara tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakta, situasi yang "obyektif" tetapi terhadap "citra" mereka tentang situasi itu. Yang

⁷ Ole Holsti, *Foreign Policy Formation viewed Cognitively*, dalam Axelrod (ed.), *Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites*, Princeton Univ. Press, Princeton, 1976, hal. 19-20

menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia itu.⁸

Tanggapan seseorang atau kelompok terhadap suatu situasi, didasarkan pada persepsinya itu. Para pembuat keputusan, seperti halnya manusia lainnya, dipengaruhi oleh berbagai proses psikologik yang mempengaruhi persepsi (misalnya, kehendak untuk merasionalisasikan tindakan, untuk mengurangi kecemasan, dsb.) dan proses psikologik lain yang membentuk kepribadian-kepribadiannya.⁹

Gambar 1.2
Hubungan antara Sistem Keyakinan dengan
Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri



Sumber: Ole R. Holsti, "The Belief System and National Images: A case Study", dikutip dalam Bruce Russett and Harvey Starr, *World Politics*, (New York: Freeman, 1985).¹⁰

⁸ Kenneth Boulding, dikutip dalam Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU Studi-Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal. 19

⁹ Mohtar Mas'ood, *Op.cit.*, hal.20

¹⁰ *Ibid.*

Menurut Russet dan Starr, citra seseorang dalam mempengaruhi persepsinya tentang dunia di sekitarnya, mula-mula nilai keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa yang dilihat dan diperhatikan. Kemudian berdasar sikap dan citra yang telah dipegangnya selama ini, stimulus itu diinterpretasikan.¹¹

Jadi orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka "*ketahui*". Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang "*kenyataan*". Sukarno melakukan politik konfrontasi terhadap Malaysia karena ia memandangnya sebagai proyek imperialisme Inggris dan Amerika Serikat dan karena.

Konsep Globalisasi

Manusia dalam berpikir menggunakan "bahasa" yaitu suatu sistem komunikasi yang terdiri dari simbol-simbol dan serangkaian aturan yang memungkinkan berbagai pengkombinasian simbol-simbol itu. Sedangkan konsep adalah salah satu simbol yang paling penting dalam bahasa. Ilmu atau sains mulai dengan menciptakan konsep-konsep untuk mendiskripsikan dunia empiris. Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.¹²

Istilah globalisasi telah menjadi konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena dunia kontemporer. Memasuki millennium ketiga,

¹¹ *Ibid.*

dunia berubah sangat cepat sehingga menimbulkan implikasi yang sangat kompleks, yaitu munculnya saling ketergantungan (*interdependence*) dalam hampir seluruh dimensi kehidupan dalam hubungan antarnegara-bangsa (*nation-state*) dan hubungan transnasional (*transnasional relations*). Perubahan-perubahan yang sangat cepat inilah yang kemudian disebut dengan globalisasi.¹³

Fenomena ekonomi di dunia saat ini semakin terintegrasi kedalam dunia yang tunggal, Lodge (1991) mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Dengan pengertian yang demikian, maka globalisasi boleh dikatakan bahwa masyarakat dunia hidup dalam suatu era dimana sebagian besar kehidupan mereka sangat ditentukan oleh proses-proses global.¹⁴

Globalisasi sebagai deskripsi mengacu pada perluasan dan penguatan arus perdagangan, modal, teknologi, dan arus informasi internasional dalam sebuah pasar global. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan fenomena dunia kontemporer di bidang ekonomi dan perdagangan dimana batas geografis negara bangsa tidak lagi mempunyai makna. Suatu konsep yang digunakan untuk menggambarkan dunia yang dicirikan oleh adanya “perkampungan global” dan melemahnya peran negara bangsa yang digantikan oleh kekuatan-kekuatan

global.¹⁵ Kekuatan global disini adalah sebuah organisasi internasional yang mengatur perdagangan dunia, yaitu World Trade Organization.

F. Hipotesa

Implementasi aturan dalam WTO oleh Dunia usaha (Kadin Indonesia) belum sepenuhnya berjalan maksimal, karena masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang mengakibatkan perkembangan dunia usaha belum maksimal.

G. Jangkauan Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tidak berlarut-larut maka penulis memberikan batasan waktu sehingga akan lebih terfokus pada permasalahan yang telah ditentukan. Secara khusus penulis membatasi implementasi TRIMs oleh KADIN pada periode tahun 2003-2005.

H. Jenis Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kasus (*case study*). Dimana metode penelitian kasus adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial; individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat dengan ciri:¹⁶

¹⁵ *ibid*

- a. Penelitian kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut. Tergantung kepada tujuannya, ruang lingkup penelitian itu mungkin mencakup keseluruhan siklus kehidupan atau hanya segmen-segmen tertentu saja; studi demikian itu mungkin mengkonsentrasikan diri pada faktor-faktor khusus tertentu atau dapat pula mencakup keseluruhan faktor dan kejadian-kejadian.
- b. Studi kasus cenderung untuk meneliti jumlah unit yang kecil tetapi mengenai variabel-variabel dan kondisi-kondisi yang besar jumlahnya

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia Pusat, dengan tujuan karena penulis ingin mengetahui sejauh mana dampak implementasi dari Undang-undang WTO tentang TRIM's terhadap Kamar Dagang dan Industri Indonesia dalam perkembangan dunia usaha di Indonesia.

3. Jenis data yang dibutuhkan

a. Data Primer

Adalah data utama yang menyangkut tentang WTO dan kesepakatan-kesepakatan yang ada didalamnya dan KADIN Indonesia

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumenter, data tentang Kadin Indonesia Pusat.

4. Unit Analisis Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini maka unit analisisnya adalah Komite-komite yang menangani Bidang Investasi, Perhubungan ; Bidang Kerjasama Ekonomi International; Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan dan Sistem Fiskal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Interview

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dengan pimpinan Kadin Indonesia Pusat, Ketua atau Wakil Komite-komite dan pengurus Kadin Indonesia Pusat yang terkait dengan penelitian.

b. Dokumen

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait, artikel-artikel koran, buletin, majalah yang didapat dari lembaga-lembaga penelitian, internet, buku-buku penunjang. Sehingga dapat membantu penulisan skripsi ini

c. Observasi

Yaitu cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lokasi yaitu Kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia Pusat di Jakarta

6. Teknik Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁷

Teknik analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa dengan gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta memakai makna yang bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tabel-tabel dan gambaran keadaan. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini diujikan dengan memperhatikan *validitas, reliabilitas dan objektivitas*.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini tercakup pokok bahasan mengenai pendahuluan dengan sub pokok bahasan diantaranya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, kerangka dasar pemikiran, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II Dalam bab ini penulis memberi bahasan mengenai WTO dan Perjanjian Trade Related Investment Measures (TRIMs) serta perkembangan Perjanjian TRIMs.

Bab III Dalam bab ini dijelaskan tentang Dunia usaha, KADIN Indonesia dan penyimpangan-penyimpangan serta lemahnya hukum di Indonesia.

Bab IV Bab ini merupakan inti dari skripsi ini, dalam bab ini penulis membahas bagaimana implementasi kebijakan WTO tentang Agreement on Trade Related Investment Measures di Indonesia oleh Kadin Indonesia.

Bab V Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab